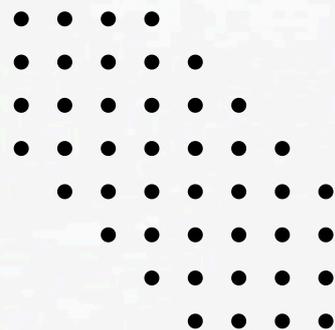




DOKUMEN RENJA PERUBAHAN 2024

**Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan**



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD	11
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan SKPD	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja SKPD	19
3.3 Program Dan Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Balangan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Balangan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Renstra 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, Rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan .

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, Juli 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Perubahan dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi nyata pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Mengevaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun-tahun sebelumnya dan mengevaluasi Kinerja terhadap capaian Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Dari Evaluasi tersebut dapat direncanakan terhadap pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 2021-2026. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 juga dirumuskan untuk mensinkronkan dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 2024 didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Renja Perubahan Satpol PP Tahun 2024 memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan rencana Program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 Tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan ke empat atas peraturan Bupati Balangan Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran *Anggaran* Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun *Anggaran 2022*;
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Dan Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026;

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 di lakukan setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II.
3. Penambahan Program dan Kegiatan yang mendukung Pengamanan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.

Penyusunan Renja-P SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan arahan atau acuan bagi pelaksana program dan kegiatan guna tercapainya sasaran dan perencanaan pembangunan dan memfasilitasi dan upaya bagi pencapaian visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun visi dan misi dari Renstra adalah sebagai berikut :

“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Dan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian mastarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
4. Mewujudkan kehidupan sosial, Budaya dan agama serta Pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II)

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab IV. Penutup

Berisikan uraian penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah :

1. Menurunnya Pelanggaran Perda

Indikator Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Adalah Persentase pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti, dengan Pengaduan yang di terima baik secara On line ataupun Off Line adalah sebanyak 4 Kasus dan tertangani sebanyak 4 kasus dengan Capaian 100%.

2. Menurunnya gangguan Trantibum

Indikator Sasaran Kinerja satuan polisi pamong Praja adalah Persentase Penurunan gangguan trantibum Dengan target Kinerja sebesar 10% dengan Capaian pada triwulan II ini sebesar 5%.

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas inerja Instansi Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya di kaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Balangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat daerah
- e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

Dengan Realisasi keuangan pada program penunjang urusan pemerintah Kabupaten / Kota ini sampai dengan TW II telah terealisasi RP 4.913.311.223 dari target Rp 8.984.504.967 dengan capaian 54,69% terhadap target keuangan 2024.

Capaian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja sampai dengan TW II untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SOPD TAHUN BERJALAN (n) YANG DI EVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SOPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RELISASI ANGGARAN RENJA SOPD (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP
A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Akuntabilitas Kinerja (Nilai sakiP)	74,4	8.984.504.967	73,6	4.913.311.223	99,46	54,69
SEKRETARIAT				K	RP	K	RP	K	RP
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	210.627.000	50%	88.686.800	50%	42,11
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.846.900.117	50%	3.936.018.140	50%	57,49
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.134.732.000	50%	610.594.196	50%	53,81
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	356.978.100	50%	156.184.762	50%	43,75
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	10.553.000	50%	3.464.900	50%	32,83
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	134.813.900	50%	44.591.500	50%	33,08
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	289.900.850	50%	73.770.925	50%	25,45

4. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yang terdiri dari :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah kabupaten/ Kota.
- b. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota.

Program Peningkatan Keamanan dan Ketenteraman umum alokasi dana sebesar Rp9.389.229.620,- dan realisasi sampai triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 3.907.924.320,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 41,62%.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan TW II untuk Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum di lihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SOPD TAHUN BERJALAN (n) YANG DI EVALUASI TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SOPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN RELISASI ANGGARAN RENJA SOPD (%)	
				K	Satuan	RP	K	RP	K	RP
1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				K	Satuan	RP	K	RP	K	RP
B	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	750	kegiatan	9.389.229.620	375	3.907.924.320	50,00	41,62
	Meningkatnya Jumlah SDM Satpol PP yang Tangguh		Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	80	%		76%		76%	
	Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas		Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100	%		50%		50%	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perda		Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	100	%		76%		76%	
1	Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	60	Kasus	8.774.819.620	30	3.711.458.720	50	42,30
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP		Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20	Orang		10		50	
	Meningkatnya Dukungan Kerjasama yang baik dengan SKPD Pengampu Perda dalam Tekhnik penanganan Trantibum		persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda	80	%		76		95	
	Terseleenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas		Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355	Orang		1.178		50	
2	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	24	Perda	614.410.000	12	196.465.600	50	31,98
	Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan		Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	10	Kasus		4		40	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu sasaran Strategis yaitu, “MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF” hal tersebut dalam pelaksanaannya juga di jadikan sebagai indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat di lihat dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI SAMPAI TW II	CAPAIAN SAMPAI TW II
1	2	3	4	5	6
A	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	PERSENTASE PELANGGARAN PERDA YANG DI TINDAK LANJUTI	100%	100%	100%
B	MENURUNYA GANGGUANG TRANTIBUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUANG TRANTIBUM	10%	5%	50%

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan SOPD mengacu pada SPM TRANTIBUMLINMAS yaitu jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan

Hukum Perda dan Perkada, dan sampai dengan triwulan II tahun 2023 pelayanan SPM trantibumlinmas dapat di lihat pada tabel berikut :

**Perkembangan, Penerapan Dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimals/d Triwulan II Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI SAMPAI TW II	CAPAIAN SAMPAI TW II
1	2	3	4	5	6
A	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	8000 Orang	4000 Orang	50%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SOPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2024 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SOPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk Mewujudkan Kehidupan Sosial , budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif . Penciptaan kondisi kondusif dalam pengertian tentram dan tertib merupakan tugas dan tanggung jawab baik itu oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan maka tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi , hal itu tercermin dari terciptanya sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Adanya Pemilu 2024.
2. Standar SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangf masih sangat terbatas
4. Disamping itu dalam pelaksanaan operasional kegiatan Satpol PP tetap melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan merupakan salah satu dari unsur garda terdepan dalam penegakan Perda dan Perkada.
5. Dalam pelaksanaan operasional sarana penunjang masih belum memadai, sehingga kegiatan dirasakan masih belum optimal sebagaimana diharapkan.
6. Secara ekstern, kondisi masyarakat kita masih belum optimal dalam mendukung program yang dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal.

7. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
8. Kurangnya kesadaran Dari Masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah yang dilaksanakan
9. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

Adapun hal – hal yang perlu di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Perda dan Perkada belum optimal sehingga perlu di tingkatkan kerjasama dengan TNI,Polri dan Instansi Terkait.
2. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Anggota Linmas Dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lingkungan Masyarakat masih rendah sehingga perlu Meningkatkan Rasio Petugas Linmas yang terdidik danTerlatih
3. Memastikan Keadaan Menjelang Pemilu tahun 2024 tetap aman dan damai.

Dari uraian tersebut menjadi bahan bagi SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dimana peningkatan kerjasama dalam sosialisasi bersama Polri, TNI dan instansi terkait, mengikutsertakan anggota satpol pp dan Anggota Linmas dalam berbagai pelatihan dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan peraturan Bupati menjadi fokus kami untuk dilaksanakan ditahun ini.

Sedangkan beberapa peluang yang terkait dengan peningkatan keamanan yang perlu di cermati di antaranya adalah:

- a. Adanya Dukungan masyarakat
Dengan adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah maka dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Adanya Kerjasama
Pola Kerjasama adalah salah satu usaha untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah.
- c. Adanya Dukungan Pemerintah daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah baik dari administrasi maupun teknis.

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,4	74,4	74,4	8.747.706.115,00	8.984.504.967,00	11.165.295.312,00	
1		PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	210.627.000	210.627.000	235.618.000	
		Penyusunan Dukomen Perangkat Daerah	Penyusunan Dukomen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	122.054.500	122.054.500	126.645.500	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.032.500	29.032.500	32.032.500	
		Evaluasi dan Kinerja Perangkat da	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.540.000	59.540.000	76.940.000	
2		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	6.610.101.265,00	6.846.900.117,00	8.586.099.312,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41/14	41/14	41/14	6.610.101.265,00	6.846.900.117,00	8.586.099.312,00	

3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	1.134.732.000	1.134.732.000	1.138.732.000	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	817.932.000	817.932.000	817.932.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	316.800.000	316.800.000	320.800.000	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	356.978.100	356.978.100	483.595.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	53.880.600	53.880.600	111.247.600	
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	12 paket	12 paket	12 paket	21.547.500	21.547.500	21.547.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.050.000	273.050.000	342.300.000	
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	10.553.000	10.553.000	227.051.600	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	10.553.000	10.553.000	227.051.600	

6		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	100%	100%	134.813.900	134.813.900	153.023.450	
		Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	134.813.900	134.813.900	153.023.450	
7		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	289.900.850	289.900.850	341.175.850	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	65	65	65	269.150.850	269.150.850	289.150.850	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	55	55	55	20.750.000	20.750.000	52.025.000	
B		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum	Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum	750 Kegiatan	750 Kegiatan	750 Kegiatan	9.389.229.520	9.389.229.520	13.329.156.620	
				Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	80%	80%	80%				
				Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100%				
				Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	100%	100%	100%				

1		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Jumlah Pelanggaran Trantibum yang di tindaklanjuti	Jumlah Pelanggaran Trantibum yang di tindaklanjuti	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	8.774.819.620	8.774.819.620	12.709.206.620	
				Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20 Orang	20 Orang	20 Orang				
				persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda	persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda	80%	80%	80%				
				Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang	2355 Orang	2355 Orang				
		Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.021.214.200	2.021.214.200	2.021.214.200	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	414.811.000	414.811.000	614.391.000	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	120.795.000	120.795.000	193.502.500	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6.030.607.670	6.030.607.670	6.266.059.820	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13 Unit	13 Unit	13	187.391.750	187.391.750	3.614.039.100	
2		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	24 Perda	24 Perda	24 Perda	614.410.000	614.410.000	614.410.000	
				Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus				
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	207.190.000	207.190.000	211.090.000	
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 laporan	24 laporan	24 laporan	407.220.000	407.220.000	408.860.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan maupun keluhan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat diperoleh melalui beberapa cara yaitu, penyampaian langsung kepada petugas maupun melalui telepon. Beberapa usulan yang di inginkan oleh masyarakat sebagian besar berharap bahwa adanya peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat di kabupaten Balangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap penegakan Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten balangan tahun 2021-2026, Maka di peroleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum yaitu isu kondusivitas dan Stailitas daerah. Hal ini di dapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung Sosial Ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum dapat di identifikasi beberapa dampak sosial masyarakat yaitu Meningkatnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Dapat di lihat dengan menurunnya kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta optimalisasi peningkatan kapasitas anggota linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada.

Untuk lebih jelasnya mengenai dampak sosial ekonomi dari penegakan perda dan perkada dapat di lihat dalam tabel Berikut :

NO	KEGIATAN	DAMPAK SOSIAL	DAMPAK EKONOMI
1	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Terwujudnya masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Kondisi daerah yang aman dan tertib serta demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi masuk ke daerah
2	SOSIALISASI PERDA DAN PERKADA	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	
3	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelayanan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meningkat	

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam permendagri 27 Tahun 2014 dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui :

1. Penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten /Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial maupun penindakannya yustisial.
2. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan tersebut untuk mewujudkan rasa tentram dan damai masyarakat Balangan dengan meningkatkan kesiagaan anggota Polisi Pamong Praja dalam menanggapi keadaan di lapangan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan pemahaaman tentang kenyamanan dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.
 2. Menciptakan keamanan , ketertiban dan ketentraman lingkungan sesuai dengan perundang-undangan bagi masyarakat.
 3. Mengikutsertakan aparat Satpol PP dalam berbagai pelatihan dan pendidikan supaya terpenuhi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja yang berkualitas.
2. Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi bersama POLRI, TNI dan instansi terkait

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2024 adalah Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban Umum menghadapi dan Pemilukada tahun 2024 agar berjalan lancar aman damai dan kondusif.

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah berdasarkan evaluasi kerja sampai triwulan II tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa target kinerja secara umum adalah Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Di samping sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan yaitu menurunnya Pelanggaran Perda dan Menurunnya Gangguan Trantibum

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Balangan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
A	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT	MENURUNYA PELANGGARAN PERDA	PERSENTASE PELANGGARAN PERDA YANG DI TINDAK LANJUTI
B		MENURUNYA GANGGUANG TRANTIBUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN TRANTIBUM

3.4 Program Dan Kegiatan

Sebagaimana dikatakan bahwa tujuan dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk Meningkatkan keamanan dan ketertiban Umum Masyarakat Satuan Polisi mempunyai 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, yang sebelum Renja Perubahan tahun 2024 terdiri dari 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, dengan penambahan biaya sebesar Rp 3.086.795.342,- (*Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*). Untuk Lebih Jelasnya dapat di Lihat pada Tabel Berikut :

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan													
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N									
				Sebelum			Setelah						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 18.136.939.315	18.136.939.315	Rp. 20.109.902.677	Rp. 1.113.831.980	21.223.734.657	3.086.795.342
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp. 18.136.939.315	18.136.939.315	Rp. 20.109.902.677	Rp. 1.113.831.980	21.223.734.657	3.086.795.342
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				Rp. 8.747.709.695	8.747.709.695	Rp. 10.399.369.437	Rp. 613.831.980	11.013.201.417	2.265.491.722
1	05	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 210.627.000	210.627.000	Rp. 248.857.000		248.857.000	38.230.000
1	05	01	2,01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 122.054.500	122.054.500	Rp. 131.414.500		131.414.500	9.360.000
1	05	01	2,01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.032.500	29.032.500	Rp. 41.302.500		41.302.500	12.270.000
1	05	01	2,01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.540.000	59.540.000	Rp. 76.140.000		76.140.000	16.600.000
1	05	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.610.104.845	6.610.104.845	Rp. 7.979.873.187		7.979.873.187	1.369.768.342
1	05	01	2,02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.610.104.845	6.610.104.845	Rp. 7.979.873.187		7.979.873.187	1.369.768.342
1	05	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 1.134.732.000	1.134.732.000	Rp. 1.355.212.000		1.355.212.000	220.480.000
1	05	01	2,05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 817.932.000	817.932.000	Rp. 945.932.000		945.932.000	128.000.000
1	05	01	2,05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 316.800.000	316.800.000	Rp. 409.280.000		409.280.000	92.480.000
1	05	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 356.978.100	356.978.100	Rp. 367.858.100		367.858.100	10.880.000
1	05	01	2,06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.880.600	53.880.600	Rp. 53.880.600		53.880.600	-
1	05	01	2,06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.547.500	21.547.500	Rp. 21.547.500		21.547.500	-
1	05	01	2,06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.500.000	8.500.000	Rp. 8.500.000		8.500.000	-
1	05	01	2,06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 273.050.000	273.050.000	Rp. 283.930.000		283.930.000	10.880.000
1	05	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 10.553.000	10.553.000	Rp. 22.854.400	Rp. 613.831.980	636.686.380	626.133.380
1	05	01	2,07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.553.000	10.553.000	Rp. 22.854.400	Rp. 613.831.980	636.686.380	626.133.380
1	05	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 134.813.900	134.813.900	Rp. 134.813.900		134.813.900	-
1	05	01	2,08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 134.813.900	134.813.900	Rp. 134.813.900		134.813.900	-
1	05	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 289.900.850	289.900.850	Rp. 289.900.850		289.900.850	-
1	05	01	2,09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 269.150.850	269.150.850	Rp. 269.150.850		269.150.850	-
1	05	01	2,09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.750.000	20.750.000	Rp. 20.750.000		20.750.000	-

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp. 9.389.229.620	9389229620	Rp. 9.710.533.240	Rp. 500.000.000	10210533240	821.303.620
1	05	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 8.774.819.620	8774819620	Rp. 9.096.123.240	Rp. 500.000.000	9.596.123.240	821.303.620
1	05	02	2,01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.021.214.200	2.021.214.200	Rp. 1.700.834.200		1.700.834.200	- 320.380.000
1	05	02	2,01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi/Manusia	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 414.811.000	414.811.000	Rp. 693.808.500	Rp. 125.000.000	818.808.500	403.997.500
1	05	02	2,01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.795.000	120.795.000	Rp. 136.439.500		136.439.500	15.644.500
1	05	02	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.030.607.670	6.030.607.670	Rp. 6.373.735.490		6.373.735.490	343.127.820
1	05	02	2,01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 187.391.750	187.391.750	Rp. 191.305.550	Rp. 375.000.000	566.305.550	378.913.800
1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp. 614.410.000	614.410.000	Rp. 614.410.000		614.410.000	-
1	05	02	2,02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 207.190.000	207.190.000	Rp. 208.110.000		208.110.000	920.000
1	05	02	2,02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 407.220.000	407.220.000	Rp. 406.300.000		406.300.000	- 920.000
Jumlah								Rp. 18.136.939.315	18.136.939.315	Rp. 20.109.902.677	Rp. 1.113.831.980	21.223.734.657	3.086.795.342

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024 dibuat dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan dengan mengacu RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban Umum masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam merumuskan program dan kegiatan perubahan tahun 2024. Seluruh perubahan yang terjadi dalam Program dan Kegiatan tahun 2024 telah di pertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2024.

Harapan kami Pada Rencana Kerja Perubahan ini Kondisi, Sosial, Ekonomi, Politik dan kebijakan pemerintah Kabupaten Balangan tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, sehingga target yang telah di ditetapkan dalam perencanaan ini dapat tercapai secara optimal

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Paringin, Juli 2024

